

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Seperti diketahui, negara Indonesia dalam melakukan pembangunan cenderung mengutamakan kota (urban bias) dengan cara investasi industri (Gusti Muhtadin, 3:1998). Kebijakan yang bersifat urban bias tersebut berakibat semakin melebarnya perbedaan dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya perbedaan pendapatan antar daerah perkotaan yang menjadi pusat pengembangan industrialisasi dengan daerah pedesaan. Adanya kesenjangan pendapatan inilah yang menyebabkan timbulnya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua masalah yang saling terkait. Pengangguran merupakan salah satu pemicu dari terjadinya kemiskinan, di lain sisi pengangguran dapat disebabkan oleh kondisi miskin. Sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2010, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) hanya mampu menurunkan 1,5 persen dari total pengangguran yang ada, dan memasuki tahun 2011 pengangguran yang ada meningkat pada angka 9,25 juta jiwa (Jarno, 2011: <http://kompas.com> diakses Senin, 21 November 2011)

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011

Wilayah	Jumlah penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Percentase Penduduk Miskin (%)
Kota	10,95	9,09
Desa	18,94	15,59
Kota + Desa	29,89	12,36

Sumber: BPS Tahun 2012

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia untuk wilayah kota sebanyak 10,95 juta jiwa (9,09%), sedangkan jumlah penduduk miskin untuk wilayah desa sebanyak 18,94 (15,59%), sehingga total penduduk miskin di Indonesia untuk wilayah kota dan desa sebanyak 29,89 (12,36%).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2011

Wilayah	Jumlah penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Percentase Penduduk Miskin (%)
Kota	298,92	12,88
Desa	265,31	22,57
Kota + Desa	564,23	16,14

Sumber: BPS Tahun 2012

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Yogyakarta untuk wilayah kota sebanyak 298,92 juta jiwa (12,88%), sedangkan jumlah penduduk miskin untuk wilayah desa sebanyak 265,31 juta

jiwa (22,57%), sehingga total penduduk miskin di Yogyakarta untuk wilayah kota dan desa sebanyak 564,23 (16,14%).

Fenomena kemiskinan Kota Yogyakarta merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat secara mudah diatasi oleh pemerintah. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata seiring dengan perkembangan kota memiliki daya tarik yang kuat terhadap urbanisasi yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Keberagaman budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kota Yogyakarta menjadi sangat beragam. Salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yaitu dengan mengembangkan sektor informal.

Sektor informal memberikan nafas baru bagi masyarakat yang tidak memiliki kompetensi maupun kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ketergantungan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan akan berkurang ketika masyarakat mampu menciptakan usahanya sendiri. Artinya masyarakat dapat menghasilkan nafkah bagi dirinya sendiri dan tidak lagi bergantung pada kondisi-kondisi yang fluktuatif sehingga dapat menuju ke arah kemapanan. Apabila masyarakat yang berada pada potensi “pengangguran” dapat mencapai kemapanan melalui usaha kecil, beberapa aspek dapat tercakup. Aspek tersebut di antaranya masalah kemiskinan, pengangguran, maupun angka ketergantungan (Ikhwan, 2011: 4).

Salah satu bagian dari sektor informal adalah pedagang kaki lima (PKL). PKL termasuk dalam usaha kecil yang berorientasi pada laba (*profit*)

layaknya sebuah kewirausahaan (*entrepreneurship*). PKL mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahanya agar mendapatkan keuntungan. PKL menjadi manajer tunggal yang menangani usahanya mulai dari perencanaan usaha, menggerakkan usaha sekaligus mengontrol atau mengendalikan usahanya, padahal fungsi-fungsi manajemen tersebut jarang atau tidak pernah mereka dapati dari pendidikan formal. Manajemen usahanya berdasarkan pada pengalaman dan alur pikir mereka yang otomatis terbentuk sendiri berdasarkan arahan ilmu manajemen pengelolaan usaha, hal inilah yang disebut “*learning by experience*” (belajar dari pengalaman). Kemampuan bisnis memang sangat diperlukan PKL guna mengembangkan usahanya (Mulyanto, 2004: 74).

Pandangan para pejabat kota terhadap PKL pun mendua. Di satu pihak mereka mengakui bahwa PKL merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja di kota, bahkan dalam pidato-pidato para pejabat kerap kali menyatakan bahwa PKL merupakan satu-satunya alternatif bagi banyak orang agar terhindar dari kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Akan tetapi mereka juga memandang PKL sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, serta mengganggu para pejalan kaki. Karena itu menurut para pejabat PKL harus ditertibkan dari wilayah-wilayah kota paling mewah dan paling elite (Didik J. Rachbini, 1991: 9).

Selama ini dalam menjalankan bisnisnya, para PKL di Yogyakarta cenderung hanya memiliki keberanian, kreativitas dinamis, dan belum

memahami kebutuhan. Mereka memerlukan berbagai sarana, bantuan dan perlindungan agar tidak berakhir dengan kegagalan. Jiwa wiraswasta tidak bisa berdiri dalam dirinya sendiri. PKL berkaitan dengan suatu sistem ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kreativitas agar usaha para PKL yang selama ini telah dijalankan dapat berkembang.

Kemampuan kewirausahaan PKL sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diduga berasal dari dalam diri PKL (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor internal yang dipandang penting yaitu umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, pengalaman usaha, dan motivasi, sedangkan faktor eksternal yang dipandang esensial adalah modal, keluarga, lingkungan kerja, jumlah konsumen, peluang pembinaan usaha, dan ketersediaan bahan-bahan untuk usaha PKL pemakai gerobak usaha makanan (Sapar, 2006: 13).

Begitu juga yang dialami dengan PKL di Yogyakarta khususnya di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). PKL di kawasan UNY merupakan tenaga kerja yang sebenarnya tidak mempunyai keterampilan dan mempunyai modal kecil dan berusaha mempertahankan hidup di tengah ganasnya kehidupan kota. Dari sinilah PKL berkecambah dan menjamur memadati ruas-ruas jalan tempat utama lalu-lalangnya masyarakat perkotaan di kawasan UNY.

Mengenai penentuan lokasi berdagang, PKL memilih tempat-tempat strategis yang dekat dengan para konsumen seperti kawasan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Universitas Negeri Yogyakarta merupakan

Universitas yang berkembang menjadi kawasan terpadu dengan didukung adanya pelayanan pendidikan, olahraga, serta perdagangan. Terlebih Universitas Negeri Yogyakarta saat semakin melebarkan sayap dengan perluasan area dan pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. PKL pun menjamur di sekitar kawasan tersebut, padahal sebagai Universitas yang memberikan pelayanan pendidikan, kawasan tersebut menuntut kondisi yang steril atau bersih baik dari segi sosial ataupun fisik kawasan.

Visual kemegahan Universitas Negeri Yogyakarta seakan ternodai dengan keberadaan PKL. Selain itu, keberadaannya yang berlokasi secara linier di sepanjang jalan di sekitar pintu masuk Universitas Negeri Yogyakarta menimbulkan berbagai masalah, diantaranya: kemacetan, kesan tidak teratur semrawut, dan penumpukan aktivitas.

Perkembangan PKL yang paling pesat berlokasi di sepanjang Jalan Colombo Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa hingga saat ini pada jalan tersebut telah terdapat sekitar 60 PKL. Banyaknya jumlah PKL yang berdagang di kawasan UNY mendorong para PKL untuk mampu bersaing dengan pedagang lainnya. Oleh karena itu, para PKL harus memperhatikan kemajuan bisnisnya. Bisnis skala kecil maupun besar harus menjaga kualitas produksi barang dan kepuasan konsumen akan barang dagangannya. Semakin lama persaingan bisnis semakin banyak, baik yang sama jenis usahanya maupun yang berbeda. Seorang pedagang harus mempunyai strategi bisnis untuk bisa tetap menjalankan bisnisnya. Meskipun dalam bisnis ini banyak persaingan serta

hambatan yang beraneka ragam, namun bagaimana seorang pedagang beretika untuk menjalankan bisnisnya (Pengamatan langsung pada tanggal 15 November 2011).

Dalam kehidupan bisnis yang makin marak di masyarakat sering dijumpai hal-hal yang telah dan mungkin akan terus terjadi penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran yang masih saja dilakukan oleh para pelaku bisnis. Penyimpangan-penyimpangan tersebut sering dilakukan karena faktor-faktor cara pandang dan ruang lingkup ukuran atau tolok ukur yang dipergunakan untuk menilai benar tidaknya perilaku bisnis. Praktek bisnis yang umum terjadi antara lain: tujuan bisnis yang sangat kuat pada orientasi maksimalisasi profit, kinerja diukur dominan dengan tolak ukur ekonomi dan finansial, kurang pada kualitas cara meraih sukses bisnis, kepentingan masyarakat lain kurang diperhatikan, kegiatan bisnis hanya mengutamakan prinsip ekonomi dan kurang memperhatikan unsur moralitas, dan kegiatan bisnis yang dapat melanggar etika moral sering dianggap wajar oleh pelaku bisnis serta bukan tanggung jawab bisnis (Muslich, 2004: 15-16).

Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus memiliki etika bisnis yang baik agar konsumen mau dan suka membeli produk dan jasa yang mereka tawarkan. Pemberian pelayanan kepada konsumen, harga yang terjangkau, tempat yang strategis merupakan hal-hal yang diperhatikan konsumen dalam memilih tempat yang cocok dan sesuai, sehingga konsumen merasa puas dan pedagang dapat bersaing dengan pedagang lain dalam memasarkan produknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti “Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan yang bersifat urban bias berakibat semakin melebarnya perbedaan pendapatan antar daerah perkotaan yang menjadi pusat pengembangan industrialisasi dengan daerah pedesaan.
2. Fenomena kemiskinan Kota Yogyakarta merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat secara mudah diatasi oleh pemerintah.
3. Para PKL pada umumnya tidak mempunyai keterampilan dan mempunyai modal sangat kecil berusaha mempertahankan hidup di tengah ganasnya kehidupan kota.
4. PKL dianggap sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, serta mengganggu para pejalan kaki.
5. Selama ini dalam menjalankan bisnisnya, para PKL cenderung hanya memiliki keberanian, kreativitas dinamis, dan belum memahami kebutuhan.
6. Persaingan bisnis PKL di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta sangat ketat.

7. Salah satu bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan etika bisnis adalah adanya tujuan bisnis yang sangat kuat pada orientasi maksimalisasi profit sehingga kurang memperhatikan unsur moralitas.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang harus diatasi, agar penelitian ini dapat membahas lebih tuntas dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini lebih memfokuskan pada etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam rangka menerapkan teori-teori yang diterima selama kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengambilan keputusan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pengaturan dan penertiban PKL di kota Yogyakarta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti yang lain, yang tertarik pada masalah sektor informal.